



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2020 - 2021
Masa Sidang	: V
Jenis Rapat	: Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari/Tanggal	: Kamis 27 Mei 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.00 s/d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	: Penelaahan terhadap LHP BPK RI terkait program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah.
Ketua Rapat	: DR.Hj.ANIS BYARWATI,S.Ag.,Msi.
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E.,M.Si
Hadir Pimpinan	: 2 (dua) dari 3 (tiga) pimpinan
Hadir Anggota	: 2 (dua) dari 6 (enam) anggota
Hadir Tamu	: Narasumber dari INDEF(Tauhid Ahmad) dan Narasumber dari KPPOD (Herman N Suparman S.Fil.,Msi)

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAKN DPR RI dengan Narasumber untuk mendapat masukan dari hasil penelitian guna pendalaman penelaahan BAKN sebagai mana amanat pasal 112E Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 , pada masa Sidang V Tahun 2021 terhadap hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK –RI) pada program Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah.
2. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Narasumber secara berurutan memaparkan hasil penelitiannya selama ini terhadap program Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan.

II. KESIMPULAN/POKOK-POKOK PEMBAHASAN:

Berdasarkan pemaparan dari para Narasumber maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

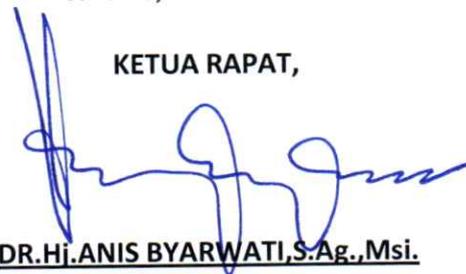
1. Pemerintah Daerah sangat tergantung pada DAK, sehingga kemandirian keuangan Daerah menjadi terkendala percepatannya.
2. Perlunya percepatan juklak/juknis dengan perencanaan dan penganggaran multiyear serta perbaikan administrasi di daerah.
3. Perbaiki kualitas perencanaan DAK, khususnya refocusing bidang dan lokus yang memberikan dampak ke daerah lebih besar, termasuk dalam tahap pengusulan proposal.
4. Belum optimalnya pendekatan disinsentif dan insentif dalam penyerapan DAK di Daerah.
5. Integrasi perencanaan DAK (Krisna) dengan matriks pembangunan RKP dan RKPD daerah (SIPD/ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sehingga terdapat keterpaduan perencanaan pusat dan daerah dan penganggaran (OM-SPAN/Online Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
6. Penguatan APIP dalam kuantitas dan kapabilitas pengawasan DAK di daerah, termasuk struktur dan kewenangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 27 Mei 2021

KETUA RAPAT,



DR.Hj.ANIS BYARWATI,S.Ag.,Msi.